

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 6

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Mintaragen	6
2.2 Sumber Daya SKPD Kelurahan Mintaragen	8
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Mintaragen	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kelurahan Mintaragen	21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 23

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 34

4.1 Visi dan Misi SKPD.....	34
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	35
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	43
---	-----------

Rencana Program dan Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan	
Indikatif	44

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	46
---	-----------

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	47
---	----

BAB VII PENUTUP	50
------------------------------	-----------

Penutup	50
---------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Mintaragen

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Data Pegawai Kelurahan Mintaragen Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2014
Tabel 2.2	:	Data Pegawai Kelurahan Mintaragen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014
Tabel 2.3	:	Peta Jabatan SKPD Kelurahan Mintaragen Tahun 2014
Tabel 2.4	:	Daftar Inventaris Barang (Aset)
Tabel 2.5	:	Anggaran dan realisasi Anggaran SKPD Kelurahan Mintaragen Tahun 2009 – 2013
Tabel 2.6	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Mintaragen
Tabel 3.1	:	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Kelurahan Mintaragen Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 4.1	:	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Kelurahan Mintaragen
Tabel 4.2	:	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan
Tabel 5.1	:	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kelurahan Mintaragen Kota Tegal
Tabel 6.1	:	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah membawa perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan nasional maupun Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi yang kemudian didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan tujuan antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat agar aspirasi kebutuhan masyarakat setempat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Tegal menyusun Rencana Strategis Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal sebagai perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk merealisasikan RPJMD tersebut, maka RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah”.

Renstra SKPD Kelurahan Mintaragen adalah dokumen perencanaan SKPD Kelurahan Mintaragen untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD Kelurahan Mintaragen Kota Tegal, disusun sesuai tugas & fungsi Kelurahan Mintaragen serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah Kota Tegal periode 2014-2019.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut Kelurahan Mintaragen Kota Tegal berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu Renstra SKPD Kelurahan Mintaragen dapat digunakan sebagai:

- a. Acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Mintaragen Kota Tegal;
- b. Dasar penilaian kinerja Lurah Mintaragen Kota Tegal;
- c. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kelurahan Mintaragen Kota Tegal.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra SKPD Kelurahan Mintaragen ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
- 19) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
- 20) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 24) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 25) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
- 26) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
- 27) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
- 28) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal;

- 29) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 35) Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.
- 36) Peraturan Walikota Tegal Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2014.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari disusunnya Rencana Strategis Kelurahan Mintaragen adalah untuk memberikan Pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan perkiraan pendanaan selama lima tahun ke depan

1.3.2. Tujuan

- a. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah daerah.
- b. Tersedianya perencanaan arah kebijakan dan strategi.
- c. Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang pelayanan administratif pemerintahan.
- d. Menjadi acuan dan pegangan SKPD Kelurahan Mintaragen dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra SKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri

dari 6 (enam) bab dan ditambah satu bab yaitu bab ke 7 (tujuh) Penutup, sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra SKPD Kelurahan Mintaragen.
2. BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD memuat tentang Gambaran Pelayanan SKPD yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
3. BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI berisikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi yang meliputi Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kota Tegal, Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis, serta Penentuan Isu-isu strategis.
4. BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN memuat tentang Visi, Misi, tujuan dan sasaran Strategi dan Kebijakan yang meliputi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan.
5. BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikatif Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.
6. BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
7. BAB 7 PENUTUP Dalam bagian ini berisi tentang kaidah pelaksanaan dan Pedoman Transisi. Kaidah pelaksanaan antara lain berisi tentang harapan kepala SKPD kepada aparatur SKPD dalam pelaksanaan Renstra SKPD; perlunya melakukan monitoring dan evaluasi Renstra SKPD; kemungkinan perubahan Renstra apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional, provinsi maupun daerah, dan penyusunan Renja harus mengacu pada Renstra SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya;
- h. Menerima pelimpahan sebagian urusan kewenangan walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dipimpin oleh Lurah yang membawahkan Sekretaris Kelurahan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1) Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretariatan Kelurahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Kelurahan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan

penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai perumusan kebijakan umum dan teknik operasional urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- c. Pengelolaan administrasi pemerintahan umum;
- d. Pengelolaan administrasi kependudukan;
- e. Pengelolaan administrasi keagrariaan;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai perumusan kebijakan umum dan teknik operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat Kelurahan;
- c. Pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

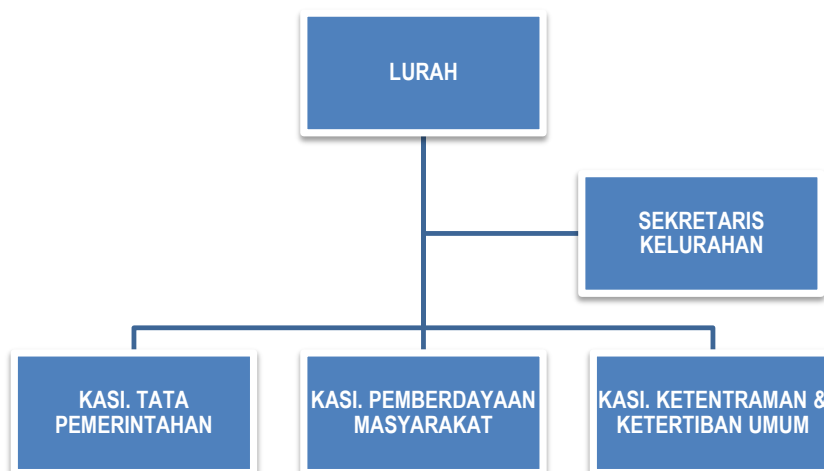
4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai perumusan kebijakan umum dan teknik operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- c. Pengelolaan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- d. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai tugas dan fungsi.

2.1.2. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan Mintaragen berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Tegal, dapat dilihat melalui bagan struktur sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Mintaragen

2.2. Sumber Daya SKPD

SKPD Kelurahan Mintaragen dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga, keuangan, serta sarana dan prasarana kantor. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya SKPD Kelurahan Mintaragen sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya:

2.2.1. Keadaan Data Pegawai

Pegawai SKPD Kelurahan Mintaragen pada bulan Juni tahun 2014 berjumlah 9 orang PNS, dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 2.1 DATA PEGAWAI KELURAHAN MINTARAGEN
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN
TAHUN 2014**

PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
Penata (III/c)	2 orang
Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 orang
Pengatur Tk.I (II/d)	2 orang
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2 orang
Pengatur (II/a)	1 orang
Juru Muda (I/a)	1 orang
JUMLAH	9 orang

Sumber : Data Kepegawaian, Juni 2014

Pegawai SKPD Kelurahan Mintaragen ini bila di kelompokkan dalam jenis kelamin maka didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebanyak 5 (lima) orang dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 (empat) orang.

**TABEL 2.2 DATA PEGAWAI KELURAHAN MINTARAGEN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2014**

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana / S2	-
2.	Sarjana/ S1	2 orang
3.	Diploma IV	1 orang
4.	Diploma III	1 orang
5.	Diploma I	-
6.	SLTA	5 orang
7.	SLTP	-
8.	SD	-
	JUMLAH	9 orang

Sumber : Data Kepegawaian, Juni 2014

**TABEL 2.3 PETA JABATAN SKPD KELURAHAN MINTARAGEN
TAHUN 2014**

No.	NAMA JABATAN	ESELON	KEADAAN TAHUN 2014		
			KEBUTUHAN	SUDAH TERISI	KEKURANGAN
1.	Lurah	IV-A	1	1	-
2.	Sekretaris Kelurahan	IV-B	1	1	-
3.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV-B	1	1	-
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV-B	1	-	1
5.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	IV-B	1	-	1
	JUMLAH		5	3	2

Sumber : Data Kepegawaian, Juni 2014

2.2.2. Sarana Kantor (*Asset*)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kelurahan Mintaragen didukung oleh sarana dan prasarana berupa asset/barang inventaris yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor. Sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kelurahan Mintaragen, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki SKPD Kelurahan Mintaragen saat ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2.4
DAFTAR INVENTARIS BARANG (ASET)

SKPD
KOTA
PROPINSI

- : KELURAHAN MINTARAGEN
- : TEGAL
- : JAWA TENGAH

KODE LKOASI : 12 11 35 50 02 00 01 00

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Jenis/ Model/ Merk/ Type Alamat/ Lokasi/ Spesifikasi	Ukuran / Bahan/ Pengarang/ Hak / Perail	Tahun Perolehan	Jumlah Barang/ Luas	Satuan Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Kondisi Barang (B, KB, RB), Penggunaan	Sumber Dana
1	2	6	7	10	12	13	14	15	16
	KIB A : TANAH								
	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya								
1	Tanah (Bata LPMK)	Jl. Halmahera	-	1980	400 m2	-	56.000,00	B	Tanah Pemda
2	Tanah (Pos Hansip)	Jl. Batanghan	-	2002	13 m2	-	3.705,000	B	Tanah P.J.K.A
3	Tanah (Bata Desa)	Jl. Halmahera	-	2009	2.540 m2	-	113.850,000	B	Tanah P.J.K.A
	JUMAH KIB A				2,953 m2		173.555,000		
	KIB B : PERALATAN DAN MESIN								
	PERALATAN :								
1	Mesin Kelik								
	Mesin Tik	Olympic	Besi	1972	1 Unit	350,000	350,000	B	APBD
	Mesin Tik	Olivetti	Besi	1995	1 Unit	2.294.600	2.294.600	B	APBD
	Mesin Tik	Olivetti Linea	Besi	2009	1 Unit	3.613.500	3.613.500	B	APBD
2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor								
	Lemari Besi								
	Lemari Besi Arsip Pintu Dorong	Alba	Besi	2005	1 Unit	1.698.000	1.698.000	B	APBD
	Rak Kayu								
	Rak Kayu (Kecil)	-	Kayu	1993	1 Unit	150,000	150,000	B	APBD
	Rak Kayu (Besar)	-	Kayu	1993	1 Unit	250,000	250,000	B	APBD
	Rak Kayu Buku Perpustakaan	-	Kayu dan Kaca	2011	2 uNit	2.500,000	5.000,000	B	APBD
	Filing Besi								
	Filing Cabinet (4)	Brother	Besi	2001	1 Unit	750,000	750,000	KB	APBD
	Filing Cabinet (4)	Dalacorp	Besi	2003	2 Unit	1.524.532	3.049.064	KB	APBD
	Filing Cabinet (4)	Brother	Besi	2014	2 Unit	1.550,000	3.100,000	B	APBD
	Lemari Kaca								
	Alman Kaca / Arsip pintu Dorong	Brother	Besi dan Kaca	2009	1 Unit	2.942.500	2.942.500	B	APBD
	Alman Kaca / Arsip pintu Dorong	Brother	Besi dan Kaca	2010	2 Unit	1.688.500	3.379,000	B	APBD
	Alman Arsip dua pintu	Brother	Besi	2014	1 Unit	2.900,000	2.900,000	B	APBD
3	Alat Kantor Lainnya								
	Papan Pengumuman / Kegiatan / Informasi								
	Papan Informasi Kegiatan	-	Kayu dan Kaca	2010	1 Unit	1.500,000	1.500,000	B	APBD
	Lain-lain								
	Mesin Absensi (Finger Print)	-	Plastik	2012	1 Unit	4.300,000	4.300,000	B	APBD
4	Alat Rumah Tangga (Mebelair)								
	Lemari Kayu								
	Lemari Kayu - Arsip	-	Kayu	1972	1 Unit	180,000	180,000	B	APBD
	Lemari Kayu 2 Pintu	-	Kayu	2003	1 Unit	1.683,000	1.683,000	B	APBD
	Lemari Piala	Benefit	Kayu dan Kaca	2014	1 Unit	1.585,000	1.585,000	B	APBD
	Meja Kayu								
	Meja Kayu (Kecil)	-	Kayu	1972	1 Unit	50,000	50,000	B	APBD
	Meja Kayu (Kecil)	-	Kayu	1953	1 Unit	75,000	75,000	B	APBD
	Meja Kayu (Kaki 3)	-	Kayu	1972	3 Unit	100,000	300,000	B	APBD
	Meja Kayu								
	Meja Kayu	Biro Kecil	Kayu	1972	1 Unit	100,000	100,000	B	APBD
	Meja Kayu	-	Kayu	1997	2 Unit	250,000	500,000	B	APBD
	Meja Kayu	-	Kayu	1997	2 Unit	250,000	500,000	B	APBD
	Meja Kayu	-	Kayu	2002	1 Unit	850,000	850,000	B	APBD
	Meja Kayu	-	Kayu	2002	1 Unit	750,000	750,000	B	APBD
	Meja Kayu	-	Kayu	2003	2 Unit	819.429	1.638.858	B	APBD
	Meja Kayu								
	Meja Kayu								
	Meja Kayu	Biro Kecil	Kayu	2008	2 Unit	850,000	1.300,000	B	APBD

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Jenis/ Model/ Merk/ Type Alamat/ Lokasi/ Spesifikasi	Ukuran / Bahan/ Pengarang/ Hak / Persil	Tahun Perolehan	Jumlah Barang/ Luas	Satuan Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Kondisi Barang (B, KB, RB)	Sumber Dana
1	2	6	7	10	12	13	14	15	16
	Cassete Recorder	TOA	Kayu dan Plastik	2005	1 Unit	400.000	400.000	B	APBD
	Lain-lain								
	Gordyn	-	Kain Satin	2011	1 Set	3.000.000	3.000.000	B	APBD
8	Personal Komputer								
	P.C. Unit								
	Komputer	Fame Comp	Fiber	1997	1 Unit	3.500.000	3.500.000	RB	APBD
	Komputer	IBM	Fiber	2005	1 Unit	6.800.000	6.800.000	B	APBD
	Komputer	IBM Lenova	Fiber	2008	1 Unit	9.000.000	9.000.000	B	APBD
	Komputer	Compaq	Fiber	2011	1 Unit	9.150.000	9.150.000	B	APBD
9	Peralatan Personal Komputer								
	Printer								
	Printer	Cannon BJ-03	Fiber	1997	1 Unit	500.000	500.000	RB	APBD
	Printer	Epson LQ 2180	Fiber	2005	1 Unit	7.055.906	7.055.906	B	APBD
	Printer	Epson LQ 2180	Fiber	2008	1 Unit	6.600.000	6.600.000	B	APBD
	Printer Multifungsi	HP	Fiber	2011	1 Unit	2.475.000	2.475.000	B	APBD
10	Kursi Kerja Pejabat								
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Oscar	Besi	2010	1 Unit	1.149.000	1.149.000	B	APBD
11	Alat Komunikasi Telephone								
	Pisawat Telephone	-	Fiber	2003	1 Unit	60.000	60.000	B	APBD
	MESIN								
1	Sepeda Motor								
	Sepeda Motor (G - 9936 - E)	Yamaha Alpha	Besi	1996	1 Unit	5.500.000	5.500.000	RB	APBD
	Sepeda Motor (G - 9966 - E)	Honda GLP III	Besi	2003	1 Unit	13.841.500	13.841.500	KB	APBD
	Sepeda Motor (G - 9601 - E)	Honda NF100SL	Besi	2004	1 Unit	12.000.000	12.000.000	B	hibah PBB
	Sepeda Motor (G - 9673 - BE)	Honda NF	Besi	2012	1 Unit	11.458.000	11.458.000	B	hibah PBB
	Sepeda Motor (G 9654 FE)	Yamaha Yupiter	Besi	2014	1 Unit	14.550.000	14.550.000	B	APBD
JUMAH KIB B							174.745.704		

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Jenis/ Model/ Merk/ Type Alamat/ Lokasi/ Spesifikasi	Ukuran / Bahan/ Pengarang/ Hak / Persil	Tahun Perolehan	Jumlah Barang/ Luas	Satuan Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Kondisi Barang (B, KB, RB)	Sumber Dana
1	2	6	7	10	12	13	14	15	16
	Khasanah Budaya Dan Sejarah	-	Kertas	2011	1 buku	35.750	35.750	B	APBD
	Mengukai Seluk Beluk Aliran Kebatinan	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Kabar Anyar Turunan Kagem Pratalacara	-	Kertas	2011	1 buku	14.300	14.300	B	APBD
	Pakem Pengelutahan Tertang Keras	-	Kertas	2011	1 buku	14.300	14.300	B	APBD
	Ujicara Pengantin Edisi baru	-	Kertas	2011	1 buku	12.100	12.100	B	APBD
	Menyikap Serat Wedadama	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Mengenal Produk Nasional Batik Dan Tenun Kain	-	Kertas	2011	1 buku	44.000	44.000	B	APBD
	Centra Rakyat Jawa Tengah	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 1	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 2	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 3	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 4	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 5	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 6	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 7	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 8	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 9	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 10	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 11	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia 12	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	Ramalan Jayabaya Ronggo Wareto Dan Sabdo Palon	-	Kertas	2011	1 buku	13.200	13.200	B	APBD
	Gesang Tetap Gesang	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Mengenal Seni Tari Indonesia	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Mengenal Kesenian Wayang	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Mengenal Candi-candi Kuno di Indonesia	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Bung Karno Pergiunya Seorang Kekasih	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Menyikap Takbir Bung Karno	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Unsur Religius Dalam Sastra Jawa	-	Kertas	2011	1 buku	14.300	14.300	B	APBD
	Hukum Dan Perundang-undangan	-	Kertas	2011	1 buku	16.940	16.940	B	APBD
	UU Otonomi Daerah No. 22 25 26 Dan PP	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	UU Perkawinan	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Mengenal Peraturan Perundang-undangan	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Napza	-	Kertas	2011	1 buku	21.120	21.120	B	APBD
	Ada Dengan Narkoba	-	Kertas	2011	1 buku	33.000	33.000	B	APBD
	Apakah Narkoba	-	Kertas	2011	1 buku	24.750	24.750	B	APBD
	Narkoba Dan Permasalahannya	-	Kertas	2011	1 buku	19.800	19.800	B	APBD
	Peran Keluarga Guru Sekolah Menyelamatkan anak Dari Napza	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Bidang Kajian Kesehatan Dan IPS	-	Kertas	2011	1 buku	22.000	22.000	B	APBD
	Bagaimana Tubuh Kita Mencerna Makanan	-	Kertas	2011	1 buku	13.750	13.750	B	APBD
	Pengobatan Tradisional	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Kumpulan Jamu Tradisional	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Manfaat Daun Sirih Untuk Kesehatan	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Tanaman apokir Indur	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Menjaga Gigi dan Mulut	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Toga (Tanaman Obat Keluarga)	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Perbuatan Dan Khasiat Susu Kedelai	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Sehat Dengan Obat Alami	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Pentingnya Imunisasi Untuk Anak	-	Kertas	2011	1 buku	27.500	27.500	B	APBD
	Mengenal Obat-obatan Untuk Kesehatan	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Mengobati Penyakit Dengan Buah Merah	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Mengenal The Haisu	-	Kertas	2011	1 buku	38.500	38.500	B	APBD
	Bidang Kajian Kelirampitan	-	Kertas	2011	1 buku	12.650	12.650	B	APBD
	Pendampingan Ibu Di dapur Koleksi m. nasio	-	Kertas	2011	1 buku	15.400	15.400	B	APBD
	Resep Masakan Sederhana	-	Kertas	2011	1 buku	13.200	13.200	B	APBD
	Resep Masakan Dan PKK	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Resep Masakan Bergizi Dan Peng. Makanan	-	Kertas	2011	1 buku	15.950	15.950	B	APBD
	Resep Masakan Dan Kue Sehari-hari	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Pembuatan Kompos Dengan Limbah Organik	-	Kertas	2011	1 buku	12.650	12.650	B	APBD
	Pelutuk Praktis Menyusun Menu	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Berbagai Olahan dari Beras Dan Kelan	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Mengenal Teknik Penjemihan Air	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Organi Dari Kertas Bekas	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Berkreasi dengan Barang Bekas	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Kreasi Bunga dari Sedotan	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Kreasi Cantik dari Bahan Kain	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Mari belajar menyulam 1	-	Kertas	2011	1 buku	18.700	18.700	B	APBD
	Mari belajar menyulam 2	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Membuat Ukiran dari Bahan Gabus	-	Kertas	2011	1 buku	33.550	33.550	B	APBD
	Aneka Kreasi Pita Jepang	-	Kertas	2011	1 buku	15.950	15.950	B	APBD
	Cara Praktis Membuat Telur Asin	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Teknik membuat Kompor Batu bara	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Teknik Pembuatan Resapan Air	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Mari belajar menyablon	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Membuat Anaka Minuman Menyehatkan	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Proses Pembuatan Tempe	-	Kertas	2011	1 buku	15.950	15.950	B	APBD
	Teknik Pembuatan minyak Kelapa	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Cara Membuat Nata de coco	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Proses Pembuatan Tahu	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Kiat Membersihkan Alat Dapur	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Mengenal Zat Adiktif Makanan	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Membuat Sulaman Tutsi Silang untuk Hiasan	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Berkreasi Dengan Ulin Wama	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Membuat Sulaman Mengubah Corak	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Seni Melipat Srebet Maken	-	Kertas	2011	1 buku	11.990	11.990	B	APBD
	Mari Berternak Ayam	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Berternak Itik	-	Kertas	2011	1 buku	13.750	13.750	B	APBD
	Home Industri Jenis B Kep Sehari-hari	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Home Industri Makanan & Minuman	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Cara Membuat Kacang	-	Kertas	2011	1 buku	15.950	15.950	B	APBD
	Cara Membuat Saus	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Merangkai Bunga	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Seni Merangkai Janur	-	Kertas	2011	1 buku	17.800	17.800	B	APBD
	Kelirampitan bambu dan rotan	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Perawatan alat rumah tangga	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Pelajaran Gita	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Ayo membuat baju sandi	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Teknik menjahit pakaian wanita dan anak	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Teknik menjahit pakaian Pria	-	Kertas	2011	1 buku	24.750	24.750	B	APBD
	Budidaya Jarak pagar (penghasil bio diesel)	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Budidaya Lidah Buaya	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Budidaya Melon dalam Polibag	-	Kertas	2011	1 buku	25.100	25.100	R	APBD

Microsistem dan Rangkaian Elektronik

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Jenis/ Model/ Merk/ Type Alamat/ Lokasi/ Spesifikasi	Ukuran / Bahan/ Pengarang/ Hak / Persil	Tahun Perolehan	Jumlah Barang/ Luas	Seban Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Kondisi Barang (B, KB, RB)	Sumber Dana
1	2	6	7	10	12	13	14	15	16
	Merawat Tanaman Hias	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Buddaya Mahkota Dewa	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Pisang Buddaya dan Anaka Olahhan	-	Kertas	2011	1 buku	17.600	17.600	B	APBD
	Buddaya Tanaman Rosela	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Buddaya Dan Pasca Panen Jati Rakyat	-	Kertas	2011	1 buku	22.000	22.000	B	APBD
	Bellanak Ayam Duras	-	Kertas	2011	1 buku	15.950	15.950	B	APBD
	Mengenal ayam Petelur	-	Kertas	2011	1 buku	16.610	16.610	B	APBD
	Membuat Taman Sayuran Di Pekarangan	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Memelihara Kucing Piaran	-	Kertas	2011	1 buku	19.700	19.700	B	APBD
	Membuat Penghijauan	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Mengenal Pembuatan dan Manfaat Yogurt	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Bidang Kajian Teknologi	-							
	Menggunakan Search Engine	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Seri Pembelajaran Internet Sistem Jaringan Komputer	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Seri Pembelajaran Internet perangkat Untuk Akses Komputer	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Cara Mudah Merakit Komputer	-	Kertas	2011	1 buku	33.000	33.000	B	APBD
	Mengelola Database Dengan MS. Access	-	Kertas	2011	1 buku	33.000	33.000	B	APBD
	Pengenalan Internet	-	Kertas	2011	1 buku	31.350	31.350	B	APBD
	Bidang Kajian Bahasa Inggris	-							
	Angel's lake	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	A shepherd' dream	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	My teacher is my hero	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	If you believe	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	My home	-	Kertas	2011	1 buku	14.300	14.300	B	APBD
	Me and family	-	Kertas	2011	1 buku	14.300	14.300	B	APBD
	My garden	-	Kertas	2011	1 buku	14.300	14.300	B	APBD
	The Peach boy	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Story of prince frog	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Story of Magic flute	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Beast prince	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Dor I, the naughty shark	-	Kertas	2011	1 buku	20.350	20.350	B	APBD
	Prince bidar	-	Kertas	2011	1 buku	20.900	20.900	B	APBD
	Get up cici	-	Kertas	2011	1 buku	20.900	20.900	B	APBD
	Bidang Kajian Pengetahuan Agama	-							
	Doa Anak	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Jual-beli Yang Benar	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Tafar Ayal-sayat Doa	-	Kertas	2011	1 buku	22.000	22.000	B	APBD
	Zakat Fitrah dan Zakat Mal	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Nama-nama Surga Dan Penghuniannya	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Nama-nama Neraka Dan Penghuniannya	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	7 Dosa yang Membahayakan	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Mengenal Kata Bahasa Arab	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Melacak Wanita-wanita Hebat	-	Kertas	2011	1 buku	33.000	33.000	B	APBD
	Etika Dan Etika Bergaul	-	Kertas	2011	1 buku	16.720	16.720	B	APBD
	Tafar Surat Yaum	-	Kertas	2011	1 buku	22.000	22.000	B	APBD
	Mengenal Allah Melalui SifatNya	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Doa Sepuluh Ibadah	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Islam Itu Bersih	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Haji Antara Sarak Dan Mitos	-	Kertas	2011	1 buku	19.800	19.800	B	APBD
	Dialog-dialog Dalam Kematiian	-	Kertas	2011	1 buku	12.650	12.650	B	APBD
	Dialog Menuju Surga	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Sejarah Tokoh Islam Indonesia	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Sejarah Tokoh Islam Dunia	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Juz'Arma Dan Terjemahannya	-	Kertas	2011	1 buku	38.500	38.500	B	APBD
	Al-Qur'an Al-Karim (Cover Hijau)	-	Kertas	2011	1 buku	44.000	44.000	B	APBD
	Mengenal Puasa Wajib Dan Sunah	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Tuntunan Akhlak Bagi Anak Perempuan Dalam Pergaulan	-	Kertas	2011	1 buku	27.500	27.500	B	APBD
	Teknik menghafal Al Quran (Seri apa kata Al Quran dan Hadist)	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Kebersamaan dan Sholat Berjamaah	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Berisl well-dan dan ukhuwah	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Takwa nist dan keikhlasan	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Keutamaan memberi dan menyayangi anak yatim	-	Kertas	2011	1 buku	18.150	18.150	B	APBD
	Tanya jawab seputar rukun Islam	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	KAJIAN IPA	-							
	Sepuluh pengawetan ikan dan daging	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Dampak rumah kaca	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Mengenal jenis-jenis batuan	-	Kertas	2011	1 buku	19.250	19.250	B	APBD
	Mateliani, tomi dan bulan	-	Kertas	2011	1 buku	30.800	30.800	B	APBD
	Mengenal laui Indonesia	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Air Hujan bagai air bersih	-	Kertas	2011	1 buku	16.500	16.500	B	APBD
	Ensiklopedia Teknologi Lingkungan	-	Kertas	2011	1 buku	61.875	61.875	B	APBD
	Ensiklopedia informasi dan komunikasi	-	Kertas	2011	1 buku	61.875	61.875	B	APBD
	Ensiklopedia sains, atmosfr, cahaya, energi, lis, bnd	-	Kertas	2011	1 buku	99.000	99.000	B	APBD
	Ensiklopedia Obat-obat alami	-	Kertas	2011	1 buku	99.000	99.000	B	APBD
	Ensiklopedia cuaca dan iklim	-	Kertas	2011	1 buku	22.000	22.000	B	APBD
	KAJIAN PENGETAHUAN UMUM VISULA DICTIONARY	-							
	Kamus Lengkap 310.000	-	Kertas	2011	1 buku	13.750	13.750	B	APBD
	Principal English Grammar Sistem 16 Jam	-	Kertas	2011	1 buku	9.350	9.350	B	APBD
	Kamus Lengkap Bahasa Indonesia	-	Kertas	2011	1 buku	264.000	264.000	B	APBD
	Atlas Indonesia dan Dunia	-	Kertas	2011	1 buku	33.000	33.000	B	APBD
	Kamus 8.000 Kata Bahasa Indonesia	-	Kertas	2011	1 buku	24.750	24.750	B	APBD
	Kamus Pribahasa Indonesia	-	Kertas	2011	1 buku	49.500	49.500	B	APBD
	390 Kata-kata mutiara	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Penuntun penyusunan karya ilmiah	-	Kertas	2011	1 buku	11.000	11.000	B	APBD
	Berklik dengan IQ, EQ, ESQ	-	Kertas	2011	1 buku	14.850	14.850	B	APBD
	KAJIAN : BAHASA INDONESIA (BACAAN FIKSI)	-							
	Adi Anak yang disiplin	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Pesan sahabat pena	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Ulang Tahun ayah	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Si riri dan tibo	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Joki dan dolly	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Sepatu belet diri	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Mari hidup rukun	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Jangan mudah menyerah	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Angsa yang tidak pernah putus	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Kiki katak yang perang	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Masih ada hari esok	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Krik-krik si pemalas	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Pelajaran buat diri	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Kisah bngp dan koko	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Katak yang males	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Anak teladan	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Budi anak yang budiman	-	Kertas	2011	1 buku	8.800	8.800	B	APBD
	Cumi Suka Bohong	-	Kertas	2011	1 buku	13.750	13.750	B	APBD
	Keserakahan si bobba	-	Kertas	2011	1 buku	13.750	13.750	B	APBD
	Caca tak anukuh laei	-	Kertas	2011	1 buku	13.750	13.750	B	APBD

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Jenis Model/ Merk/ Type Alamat/ Lokasi/ Spesifikasi	Ukuran / Bahan/ Pengarang/ Hak / Peralat	Tahun Perolehan	Jumlah Barang/ Luas	Satuan Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Kondisi Barang (B, KB, RS, Penggunaan)	Sumber Dana
1	2	6	7	10	12	13	14	15	16
	Hadiah istimewa	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Si abur yang semangat	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Ani beliger disekolah	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Bermain layang-layang	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Poni yang pemalu	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Persahabatan yang indah	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Pili dan moty	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Oti yang cerdik	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Nasehat seorang guru	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Cemburu pada adiknya	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Pemulung misterius	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Kecerdasan si rino	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	Jangan sok jagoan	-	Kertas	2011	1 buku	8.250	8.250	B	APBD
	JUMLAH KIB E						4.999.830		
	Konstruksi Dalam Pengerjaan								
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMAH KIB F				m2				
	JUMAH KIB A - F				m2		1.730.510.444		

2.2.3. Anggaran

Adapun anggaran dan realisasi anggaran dalam kurun waktu 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN SKPD KELURAHAN MINTARAGEN
TAHUN 2009-2013

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
(1)																			
INJA DAERAH	235,925	200,060	231,350	259,848	308,719	232,659	189,584	228,350	260,060	290,424	0.00	0.00	2.96	3.09	1.85	14,559	11,552		
infa tidak langsung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
infa pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
infa bunga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
infa subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
infa hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
infa bantuan sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
infa bagi hasil kepada insin/kabupaten/kota dan nerintahan desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
infa tidak terduga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
infa langsung	235,925	200,060	231,350	259,848	308,719	232,659	189,584	228,350	260,060	290,424	0.00	0.00	2.96	3.09	1.85	14,559	11,552		
infa pegawai	44,190	86,402	73,704	73,077	87,918	66,281	79,327	70,704	72,811	77,773	1.50	0.92	0.96	1.00	0.88	8,746	2,296		
infa barang dan jasa	119,931	107,088	137,841	150,786	220,801	95,117	104,229	137,841	146,915	212,651	0.79	0.97	1.00	0.97	0.96	20,174	23,507		
infa modal	71,804	6,570	19,805	35,985	0	71,261	6,028	19,805	40,334	0	0.99	0.92	1.00	1.12	0.00	(14,361)	(14,252)		
Total	235,925	200,060	231,350	259,848	308,719	232,659	189,584	228,350	260,060	290,424	0.00	0.00	2.96	3.09	1.85	14,559	11,552		

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, 2009 – 2013, terjadi penurunan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2010 sebesar 18,5% dan tahun 2011 sebesar 1,8% jika dibandingkan dengan anggaran belanja pada tahun 2009. Namun, dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik dari tahun ke tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD Kelurahan Mintaragen meliputi prosedur/ mekanisme baku yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Tegal dalam pengelolaan anggaran dimana hal ini membantu terarahnya SKPD dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan anggarannya.

Akan tetapi, masih terdapat kendala pada SKPD Kelurahan Mintaragen di dalam kegiatan pengelolaan anggaran belanja tersebut. Hal ini disebabkan oleh jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia) yang betul-betul memahami tentang pengelolaan anggaran masih terbatas sehingga berpengaruh pada progres pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Mintaragen

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Kendati Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, tetapi sampai saat ini belum ada indikator urusan penyelenggaraan desa/ kelurahan yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut sampai saat ini SKPD Kelurahan belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang penyelenggaraan kelurahan dimana kegiatan-kegiatan yang ada termasuk dalam kategori pelayanan administrasi publik. Hal inilah yang menyebabkan SKPD Kelurahan Mintaragen tidak dapat melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan SKPD dalam kurun waktu 2009 – 2013 secara kuantitatif. Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

Oleh karena itu, SKPD Kelurahan Mintaragen dalam menentukan indikator kinerjanya guna memenuhi kinerja pelayanan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal kemudian mensinergiskan tugas pokok dan fungsi kelurahan tersebut dengan Penetapan Indikator Kinerja Daerah sebagaimana telah ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014 – 2019.

Kendati pada Renstra sebelumnya SKPD Kelurahan Mintaragen tidak menetapkan Indikator capaian kinerja untuk periode tahun 2009 – 2013, tetapi kami tetap berusaha melaporkan hasil pencapaian kinerja pelayanan SKPD yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KELURAHAN MINTARAGEN

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	Bidang Kesehatan																		
	Cakupan Posyandu Strata Mandiri	-	%	-	-	-	N/A	-	-	18,18	27,27	54,54	81,81	100					
	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
II.	Bidang Pekerjaan Umum																		
	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	75,0					
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Limbah Tidak Tersumbat	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	59,4					
III.	Perencanaan Pembangunan																		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan sesuai Standar (Renstra SKPD, Renja SKPD, Dokumen Musrenbang)	-	-	3 buah	-	-	N/A	-	-	0	0	0	0	0					
	Keseluruhan kegiatan APBD dengan kegiatan Renja SKPD	-	100%	-	-	-	N/A	-	-	0	0	0	0	100					
	Tersedianya Dokumen LAKIP sesuai standar	-	-	1 buah	-	-	N/A	-	-	1	1	1	1	1					
IV.	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil																		
	Cakupan Pengantar Pemberian Kartu Keluarga (KK)	-	buah	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Cakupan Pengantar Pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	buah	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	2,610	825					
	Cakupan Pengantar Pemberian Kupon Akta Kelahiran	-	buah	-	-	-	N/A	-	-	-	290	-	254	235					
	Cakupan Pengantar Pemberian Kupon Akta Kematian	-	buah	-	-	-	N/A	-	-	-	196	-	131	152					
	Cakupan Pengantar Pemberian Surat Keterangan Pindah/Datang	-	buah	-	-	-	N/A	-	-	-	729	-	1,021	601					
V.	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																		
	Cakupan peserta KB aktif	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	74,04	72,38	72,50					
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat RW	-	%	-	-	-	N/A	-	-	0,18	0,18	0,27	0,27	0,63					
VI.	Bidang Sosial																		
	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Persentase PMKS skala Kelurahan yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah PMKS skala Kelurahan yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain.	-	kelompok / per orang	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	-	4				
VII.	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																		
	Tingkat penyelesaian Pelanggaran terkait keamanan, ketertarikan, dan keterlibatan umum	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Angka kriminalitas	-	kasus	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Cakupan patroli siaga kelermban umum dan kelermban	-	kali/ hari	-	-	-	N/A	-	-	-	-	365	-	-					
	Tingkat partisipasi dalam pemilu	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	69.5					
	Cakupan Rasio Pelugas Linmas (1 orang tiap RT)	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	34.04					
VII.	Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian																		
	Persentase PNS yang memperoleh penilaian kinerja berkategori "baik" (berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja PNS)	-	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87.5					
	Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dengan standar yang baik	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	25.0					
	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD Kelurahan Mintaragen	-	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Zero Komplain (Jumlah Komplain dibagi dengan Jumlah Pelayanan)	-	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
IX.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan																		
	Pembinaan terhadap kelermbagaan kelurahan	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	65					
	PKK Aktif (Tingkat RW)	-	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Posyandu Aktif	-	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kelurahan Mintaragen

Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang dihadapi SKPD Kelurahan Mintaragen adalah sebagai berikut:

2.4.1. Potensi dan Peluang

Potensi utama SKPD Kelurahan Mintaragen adalah keberadaan kelembagaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Tegal yang menyatakan bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan dalam wilayah kecamatan dipimpin oleh Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, dimana berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan suatu kesempatan dan peluang untuk meningkatkan mutu pelayanan Pemerintah Kota Tegal. PNS bisa bekerja secara profesional sesuai dengan tanggungjawab dan tugasnya. Pada sisi yang lain birokrasi juga dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya lewat penguasaan ilmu dan teknologi. Sebab birokrasi yang ada di Kota Tegal harus bersaing dengan pegawai dari daerah atau kementerian untuk posisi tertentu di pemerintahan. UU ASN ini menjadi pondasi penting dalam menata birokrasi Indonesia. Birokrasi yang melayani kepentingan publik, dimana kehadiran UU ASN ini menjadi daya dorong dalam mewujudkan visi Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima.

Sejalan dengan potensi tersebut, SKPD Kelurahan Mintaragen juga memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya. Potensi dan peluang yang dimiliki oleh SKPD Kelurahan Mintaragen sesuai dengan peran dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. **Aspek sumberdaya aparatur.** Penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah membutuhkan aparatur handal dan profesional sehingga memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu, SKPD Kelurahan Mintaragen dapat melakukan upaya pembinaan internal aparatur dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi. Terkait dengan itu SKPD Kelurahan Mintaragen dapat meningkatkan sumberdaya aparatur dengan berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tegal, Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal, Inspektorat Kota Tegal dan SKPD Kecamatan Tegal Timur. Selain untuk melakukan pembinaan administrasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelurahan, upaya tersebut dilakukan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur misalnya dengan mengikuti pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan/ Dinas terkait dalam rangka penyediaan dan pengembangan kader sumber daya manusia aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. **Aspek pelayanan publik.** Kelurahan mempunyai kedudukan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan karena kelurahan merupakan ujung tombak dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dalam berbagai bidang, baik administrasi pemerintahan, sosial, kesehatan, pendidikan, keagamaan, perempuan dan kesejahteraan masyarakat, hingga kelestarian hidup.

- c. **Aspek pemberdayaan masyarakat.** Kelurahan merupakan institusi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat di tingkat bawah. Oleh karena itu, penguatan peran Kelurahan perlu ditingkatkan agar mampu menjadi wadah bagi pemenuhan kepentingan masyarakat tersebut. Pada sisi lain, sejalan dengan era otonomi saat ini diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali setiap permasalahan yang dihadapinya dan menemukan jalan keluar terhadap permasalahannya. Karena itu upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan sejalan dengan penguatan peran Kelurahan. Dalam hal ini SKPD Kelurahan Mintaragen dapat melanjutkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
- d. **Aspek pembangunan kelurahan.** Pembangunan kelurahan merupakan bagian integral dari pembangunan Kota Tegal. Dalam konteks ini SKPD Kelurahan Mintaragen memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dibidang pembangunan wilayah lingkup kelurahan. Untuk itu SKPD Kelurahan Mintaragen dapat melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan kelurahan dan memberikan fasilitasi melalui program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK).

2.4.2. Tantangan

Selain memiliki potensi dan peluang, SKPD Kelurahan Mintaragen juga menghadapi berbagai tantangan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada periode tahun 2014-2019 mendatang, diantaranya sebagai berikut :

1. Masih tingginya persentase penduduk miskin (10,04%) dan tingkat pengangguran terbuka (9,25%). Hal ini berbanding lurus dengan kondisi penduduk di wilayah Kelurahan Mintaragen pada khususnya, terkait dengan masih banyaknya penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Tuntutan masyarakat mengenai pemberian pelayanan publik yang prima dan reformasi birokrasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelurahan selama lima tahun kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. **Aspek sumberdaya aparatur.** Permasalahan utama yang dihadapi SKPD Kelurahan Mintaragen dalam melaksanakan tugasnya dalam Aspek sumberdaya aparatur untuk kurun waktu lima tahun kedepan yaitu:
 - 1) Masih lemahnya kompetensi aparatur yang belum sepenuhnya profesional dan memiliki kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis/ administratif pemerintahan.
 - 2) Belum terlaksananya penerapan budaya kerja yang baik oleh aparatur sebagaimana diharapkan dalam penyelenggaraan organisasi pemerintah.
- b. **Aspek pelayanan publik.** Beberapa permasalahan yang dihadapi SKPD Kelurahan Mintaragen dalam melaksanakan tugasnya dalam Aspek pelayanan publik untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:
 - 1) Pelayanan publik yang diberikan oleh SKPD Kelurahan Mintaragen masih belum maksimal. Disamping masih lemahnya sumberdaya aparatur dan keterbatasan sarana dan prasarana kantor, tidak adanya Standar Pelayanan minimal (SPM) yang baku sangat berpengaruh bagi kelurahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
 - 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi dalam permohonan/ pengurusan pelayanan.
 - 3) Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.
- c. **Aspek pembangunan kelurahan.** Beberapa permasalahan yang dihadapi SKPD Kelurahan Mintaragen dalam melaksanakan tugasnya dalam Aspek pembangunan kelurahan untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:
 - 1) Masih rendahnya kapasitas perencanaan pembangunan infrastruktur kelurahan.
 - 2) Belum validnya data infrastruktur lingkungan di wilayah kelurahan.
 - 3) Penataan ruang dan lingkungan hidup yang masih belum maksimal. Masih banyak Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031 namun tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi, situasi dan karakteristik wilayah. Kelembagaan pengelola penataan ruang belum didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang handal serta belum ditunjang dengan penggunaan teknologi dan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan faktual. Peran masyarakat dalam penataan ruang (proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) juga masih lemah, demikian pula pengendalian

pemanfaatan ruang terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

- d. **Aspek pemberdayaan masyarakat.** Permasalahan yang dihadapi SKPD Kelurahan Mintaragen dalam melaksanakan tugasnya dalam Aspek pemberdayaan masyarakat untuk kurun waktu lima tahun kedepan yakni ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah: **“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”**. Dari visi ini dijabarkan dalam beberapa misi, sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) serta bebas dari KKN;
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal;
- 4) Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Tugas dan Fungsi Kelurahan yang berkaitan dengan visi dan misi (khususnya misi-misi) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 : *Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal*

Misi tersebut memang tidak berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan, tetapi cukup berkaitan dengan peran Kelurahan dalam memberikan kemudahan dan mengakomodasi masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan sosial yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Misi ke-2 : *Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan*

Misi tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan yang dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur kelurahan, sosial, kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi ke-3 : *Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat*

Misi tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan yang dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat (khususnya lembaga-lembaga kelurahan) dan segenap elemen masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan.

Misi ke-4 : *Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*

Misi tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan khususnya melalui kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi ke-5 : *Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance) serta bebas dari KKN*

Misi tersebut sangat berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan sebagai ujung tombak penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan yang dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta bebas dari KKN.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan SKPD Kelurahan Mintaragen terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.1
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD KELURAHAN MINTARAGEN
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi : "Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima"				
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
		Penghambat (4)	Pendorong (5)	
	(2)	(3)		
Misi ke-1 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal		----- Tidak berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kelurahan -----		
Misi ke-2 : Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan	1) Infrastruktur lingkungan di wilayah Kelurahan Mintaragen belum memadai	- Masih rendahnya kapasitas perencanaan pembangunan infrastruktur kelurahan - Belum validnya data infrastruktur lingkungan di wilayah kelurahan - Kondisi wilayah Kelurahan Mintaragen yang terletak di daerah pesisir pantai dengan ketinggian ± 0.25 m dpl menyebabkan sebagian wilayah Kelurahan Mintaragen rawan banjir/ rob - Terbatasnya anggaran pembangunan infrastruktur	- Adanya program Pemerintah Kota Tegal terkait akselerasi pembangunan infrastruktur kelurahan.	
Misi ke-3 : Mewujudkan kesatuan sosial serta ketertarikan dan keterlibatan masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Masih banyaknya warga yang dapat dikategorikan kedalam kelompok penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	- Tidak adanya database masyarakat (baik kelompok atau perseorangan) yang membutuhkan bantuan sosial terkait program peningkatan ekonomi masyarakat	- Adanya upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan dalam rangka mendorong serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif - Adanya tenaga/ sumberdaya kader-kader PKK Kelurahan yang senantiasa melakukan pemantauan dan pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial terkait program peningkatan ekonomi masyarakat	

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
1) 4	Misi ke-4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	(3) 1) Belum maksimalnya cakupan pelayanan terkait administrasi kependudukan 2) Belum maksimalnya cakupan peserta KB aktif (72,5%)	- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya terbit administrasi dalam pemohonan/ pengurusan pelayanan - Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB	- Adanya aparat kelurahan yang senantiasa mengingatkan warga masyarakat akan pentingnya terbit - Adanya tenaga sumberdaya kader-kader PKK Kelurahan yang senantiasa mendorong warga masyarakat terkait program-program kesehatan masyarakat (PHBS, Posyandu, dan KB)
5	Misi ke-5 : Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government) serta bebas dari KKN	1) Belum optimalnya pelayanan administratif pemerintahan (publik) bagi masyarakat 2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik	- Masih lemahnya kompetensi aparat yang belum sepenuhnya profesional dan memiliki kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis/ administratif pemerintahan - Belum terlaksananya penerapan budaya kerja yang baik oleh aparat sebagaimana diharapkan dalam penyelenggaraan organisasi pemerintah - Terbatasnya anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik	- Adanya upaya pembinaan internal aparat dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi - Adanya kebijakan Pemerintah Kota Tegay untuk berupaya meningkatkan pagu anggaran terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik

3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019

Adapun tujuan dan sasaran yang dirancang dalam mewujudkan visi dan misi daerah pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Misi 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kinerja koperasi dan produktivitas UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
- b. Meningkatkan kinerja penanaman modal
- c. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
- d. Meningkatkan produktivitas pertanian
- e. Meningkatkan derajat kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)
- f. Meningkatnya kinerja pariwisata kota baik wisata alam, wisata buatan maupun wisata budaya, serta atraksi pariwisata.
- g. Meningkatkan produksi hasil perikanan dan kelautan
- h. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan
- i. Meningkatkan kinerja sektor industri

Sasaran:

- a. Berkembangnya kuantitas dan kualitas koperasi.
- b. Berkembangnya UMKM yang mencakup kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perijinan.
- d. Meningkatnya realisasi investasi
- e. Meningkatnya ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
- f. Meningkatnya distribusi pangan secara merata.
- g. Meningkatnya diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat.
- h. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan
- i. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura
- j. Meningkatnya produksi peternakan.
- k. Meningkatnya derajat kesehatan hewan
- l. Meningkatnya kualitas produk asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)
- m. Meningkatnya ketersediaan pasokan energi rumah tangga.
- n. Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan asing
- o. Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
- p. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya.
- q. Meningkatnya produksi dan kualitas hasil perikanan laut (tangkap).
- r. Meningkatnya nilai ekspor
- s. Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri
- t. Berkembang dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima.
- u. Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen.

- v. Meningkatnya produktivitas industri pengolahan
 - w. Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor industri
 - x. Meningkatnya pemanfaatan teknologi pada industri kecil dan menengah.
- 2) Misi : 2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
- Tujuan:**
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pekerjaan umum
 - b. Menjamin ketercukupan kebutuhan rumah dan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.
 - c. Meningkatkan pelayanan perhubungan
 - d. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kinerja sarana prasarana perhubungan
 - e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - f. Meningkatkan kualitas manajemen pertanahan
- Sasaran:**
- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan dan jembatan
 - b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana drainase dan pengendalian rob
 - c. Mempertahankan kualitas jaringan irigasi.
 - d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan air bersih dan sanitasi
 - e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tata bangunan gedung
 - f. Meningkatnya pemerataan penerangan jalan umum
 - g. Meningkatnya ketersediaan *supply* rumah dan berkurangnya jumlah *backlog* kebutuhan rumah
 - h. Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan.
 - i. Meningkatnya pelayanan pemakaman umum bagi masyarakat.
 - j. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran
 - k. Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang pada semua level baik pemerintah kota maupun pada level kecamatan
 - l. Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
 - m. Meningkatnya pelayanan perhubungan darat
 - n. Meningkatnya pelayanan perijinan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan laut.
 - o. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - p. Meningkatnya kualitas pengelolaan pesisir pantai
 - q. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup.
 - r. Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan
 - s. Meningkatnya kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
 - t. Meningkatnya jumlah petak tanah yang tersertifikat
 - u. Menurunnya kasus-kasus sengketa pertanahan
- 3) Misi: 3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak
- b. Meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kesadaran bela negara
- d. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sasaran:

- a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.
 - b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - d. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
 - e. Meningkatnya rasa aman masyarakat
 - f. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas
 - g. Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara.
 - h. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat.
 - i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan:

- a. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pendidikan
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil
- d. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
- e. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja.
- f. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai budaya lokal
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan perpustakaan masyarakat
- h. Meningkatkan keberdayaan organisasi pemuda dan prestasi olah raga
- i. Meningkatkan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran:

- a. Meningkatnya ketersediaan sarana pelayanan pendidikan
- b. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
- d. Meningkatnya kesetaraan dalam pelayanan pendidikan
- e. Meningkatnya keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan
- g. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perorangan
- h. Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
- j. Menurunnya angka unmetneed.

- k. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
 - l. Meningkatnya kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.
 - m. Meningkatnya kesejahteraan pekerja
 - n. Semakin berkembangnya seni budaya lokal di Kota Tegal
 - o. Meningkatnya perlindungan nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah.
 - p. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan daerah
 - q. meningkatnya potensi perpustakaan masyarakat
 - r. Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda
 - s. Meningkatnya prestasi olahraga Kota Tegal
 - t. Meningkatnya ketaqwaan dan penghayatan masyarakat terhadap agamanya masing-masing.
- 5) Misi: 5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan *bersih (good and clean government)* serta bebas dari KKN.

Tujuan:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur yang amanah
- d. Meningkatkan ketersediaan data statistik yang dapat mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan
- f. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan e-government
- g. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi (sesuai dengan kewenangan pemerintah kota yaitu pada rekrutirng dan penyiapan ketrampilan serta kemampuan transmigran)

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan
- b. Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan
- d. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- e. Meningkatnya kualitas pengawasan internal
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan DPRD pada pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.
- g. Meningkatnya kualitas dan pendidikan aparatur
- h. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
- i. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan baku.
- j. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- k. Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah
- l. Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi dan meningkatnya kualitas calon transmigran

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rencana tata ruang wilayah berdasarkan Peraturan daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011– 2031 terlihat bahwa tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Tegal sebagai kota bahari yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kebijakan pola ruang Wilayah Kota meliputi :

- a. pengembangan kawasan budidaya yang efisien dan kompak;
- b. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota;
- c. peningkatan pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- d. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri.

Dari hasil penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dapat dikemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD Kelurahan Mintaragen sebagai berikut :

A. Faktor Penghambat

- 1) Sebagian besar wilayah Kelurahan Mintaragen berada di wilayah pesisir (pantai utara pulau Jawa) dimana beberapa wilayah di Kelurahan Mintaragen berada pada ketinggian $\pm 0,25$ meter di bawah permukaan laut (LIPI, 2012). Hal ini menyebabkan kawasan di Kelurahan Mintaragen berpotensi banjir/ rob.
- 2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan Kelurahan Mintaragen semakin rendah karena adanya alih fungsi lahan seiring peningkatan jumlah penduduk.
- 3) Sedikitnya ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Mintaragen.
- 4) Kurangnya prasarana terkait pengelolaan/ manajemen persampahan.

B. Faktor Pendorong

- 1) Adanya peraturan terkait pengelolaan tata ruang dan wilayah (Peraturan daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011– 2031).
- 2) Adanya *political will* dari Pemerintah Kota Tegal melalui Badan/ Dinas terkait bersama dengan DPRD Kota Tegal dalam rangka membangun wilayah dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu-isu strategis dari hasil analisis dan dengan melihat hasil telaahan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal, dan RPJMD Kota Tegal, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh SKPD Kelurahan Mintaragen pada saat ini sampai pada lima tahun mendatang adalah :

1. Masih tingginya persentase penduduk miskin (10,04%) dan tingkat pengangguran terbuka (9,25%). Hal ini berbanding lurus dengan kondisi penduduk di wilayah Kelurahan Mintaragen pada khususnya, terkait dengan masih banyaknya penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Masih lemahnya kompetensi aparatur yang belum sepenuhnya profesional dan memiliki kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis/ administratif pemerintahan. Hal ini berimplikasi

pada belum optimalnya pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

3. Kondisi geografis wilayah Kelurahan Mintaragen yang berada di pesisir pantai dengan ketinggian $\pm 0,25\text{M}$ di bawah permukaan laut (LIPI, 2012). Hal ini berdampak pada kondisi lingkungan di wilayah Kelurahan Mintaragen yang rawan banjir/ rob dengan kondisi infrastruktur, khususnya drainase dan jalan yang buruk.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi

Visi SKPD merupakan rumusan umum mengenai kondisi SKPD Kelurahan Mintaragen yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2019. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis khususnya di lingkungan Kelurahan Mintaragen yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut. Visi SKPD Kelurahan Mintaragen selama lima tahun (2014-2019) adalah :

*“Terwujudnya Manajemen Pemerintahan yang Efektif
dengan Kualitas Pelayanan Prima Berbasis Mutu melalui Kebersamaan”*

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Manajemen Pemerintahan yang **Efektif**, dengan kualitas **Pelayanan Prima Berbasis Mutu** melalui **Kebersamaan**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Manajemen Pemerintahan yang **Efektif**, merupakan suatu kondisi tata kelola pemerintahan yang baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

Kualitas **Pelayanan Prima Berbasis Mutu**, merupakan semangat segenap aparatur SKPD Kelurahan Mintaragen untuk melayani dengan baik dan memuaskan masyarakatnya (*excellent service*). Semangat Pelayanan Prima ini menjadi dasar utama dalam rangka terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif. Setiap aparat diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga penerimaan respon penilaian tingkat kepuasan dari masyarakat dapat menunjukkan kinerja semakin baik dari waktu ke waktu.

Kebersamaan, merupakan suatu kondisi terciptanya sinergi positif antara pemerintah tingkat kelurahan, badan/ dinas/ instansi vertikal diatasnya, lintas instansi dengan lembaga kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh SKPD Kelurahan Mintaragen dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 6 rumusan sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan Manajemen Pemerintahan yang Efektif.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

2) Menerapkan sistem standar pelayanan publik berbasis mutu.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis mutu dalam rangka tercapainya kepuasan masyarakat dan pelayanan prima melalui perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan lembaga kemasyarakatan melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan (RT/ RW, LPMK, PKK, Wartekkel, dan Karang Taruna) dalam rangka menciptakan sinergi positif pemerintah pada tingkat kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat.

4) Memfasilitasi program - program kesejahteraan masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk memberikan kemudahan dan mengakomodasi masyarakat yang membutuhkan program-program bantuan pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait.

5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, pembangunan, keagamaan, pelestarian seni budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi ini diarahkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan, sosial, keagamaan, pelestarian seni budaya, dan kelestarian lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan kebijakan kondusif untuk meningkatnya keberdayaan masyarakat dan perempuan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

6) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi SKPD Kelurahan Mintaragen dalam kurun waktu 2014-2019. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Menyelenggarakan Manajemen Pemerintahan yang Efektif.

Tujuan :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Misi 2 : Menerapkan sistem standar pelayanan publik berbasis mutu.

Tujuan :

Mewujudkan pelayanan publik berbasis mutu dalam rangka tercapainya kepuasan masyarakat dan pelayanan prima melalui perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur;
- b. Terselenggaranya pelayanan yang sederhana dan mempunyai kepastian waktu;
- c. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif;
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan jenis pelayanan.

3. Misi 3 : Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Tujuan :

- a. Menciptakan sinergi positif pemerintah pada tingkat kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat;
- b. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan (RT/ RW, LPMK, PKK, Wartekkel, dan Karang Taruna)

Sasaran :

- a. Terwujudnya sinergi positif pemerintah pada tingkat kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat;
- b. Meningkatnya kapasitas dan peran serta lembaga kemasyarakatan di kelurahan (RT/ RW, LPMK, PKK, Wartekkel, dan Karang Taruna).

4. Misi 4 : Memfasilitasi program - program kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

- a. Melaksanakan pendataan masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat;
- b. Memberikan kemudahan dan mengakomodasi masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait.

Sasaran :

- a. Tersedianya data masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat;
- b. Terbantunya masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait.

5. Misi 5 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, pembangunan, keagamaan, pelestarian seni budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan :

- a. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sosial, kemasyarakatan dan kelestarian hidup;
- b. Merencanakan dan menghimpun swadaya masyarakat;
- c. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, perempuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sosial, kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Terarahnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, perempuan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Misi 6 : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Tujuan :

- a. Melaksanakan kerjasama dengan aparat (Babinsa dan Babhinkamtibmas) dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengoptimalkan peran LINMAS di masyarakat;
- c. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan ketentraman dan ketertiban.

Sasaran :

- a. Terwujudnya sinergi antara Pemerintah Daerah (aparat kelurahan) dengan TNI (Babinsa) dan Polri (Babhinkamtibmas) dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- b. Meningkatnya rasa aman masyarakat;
- c. Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara;
- d. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kelurahan Mintaragen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD KELURAHAN MINTARAGEN

Visi : Terwujudnya Manajemen Pemerintahan yang Efektif dengan Kualitas Pelayanan Prima Berbasis Mutu melalui Kebersamaan										
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
MISI 1 : Menyelenggarakan Manajemen Pemerintahan yang Efektif	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan	1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Tersedianya Dokumen Perencanaan sesuai Standar (Renstra SKPD, Renja SKPD, Dokumen Musrenbang)	buah	3	3	3	3	3	3
		2) Meningkatkan kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Keseluruhan kegiatan APBD dengan kegiatan Renja SKPD	%	100	100	100	100	100	100
MISI 2 : Menerapkan Standar Pelayanan Publik Berbasis Mutu	2. Mewujudkan pelayanan publik berbasis mutu dalam rangka tercapainya kepuasan masyarakat dan pelayanan prima melalui perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	3) Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP sesuai standar	buah	1	1	1	1	1	1
		1) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur,	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD Kelurahan Mintaragen	score	N/A	62,51 - 81,25	62,51 - 81,25	62,51 - 81,25	81,26 - 100	81,26
MISI 3 : Melaksanakan Tujuan lembaga masyarakat di lingkungan		2) Terselenggaranya pelayanan yang sederhana dan mempunyai kapasitas waktu,	Zero Komplain (Jumlah Komplain dibandingkan Jumlah Pelayanan)	komplain	0	0	0	0	0	0
			Cakupan Pengantar Pemberitahuan Kartu Keluarga (KK)	buah	250	250	250	250	250	250
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Cakupan Pengantar Pemberitahuan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	buah	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
			Cakupan Pengantar Pemberitahuan Kupon Akta Kelahiran	buah	250	250	250	250	250	250
MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Cakupan Pengantar Pemberitahuan Kupon Akta Kematian	buah	150	150	150	150	150	150
			Cakupan Pengantar Pemberitahuan Surat Kelahiran	buah	750	750	750	750	750	750
MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah PNS yang memperoleh penilaian kinerja kategori "baik" berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja (PKS)	%	100	100	100	100	100	100
			Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dengan standar yang baik	%	25	35	65	75	100	100
MISI 7 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Pembinaan terhadap kelembagaan kelurahan	%	65	100	100	100	100	100
			LPWK Aktif	lembar	1	1	1	1	1	1
MISI 8 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah RT/ RW Aktif	lembar	105	105	105	105	105	105
			PKK Aktif (Tingkat RW)	%	100	100	100	100	100	100
MISI 9 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Wartelkel Aktif	lembar	0	1	1	1	1	1
			Karang Taruna Aktif	lembar	0	1	1	1	1	1

Visi : Terwujudnya Manajemen Pemerintahan yang Efektif dengan Kualitas Pelayanan Prima Berbasis Mutu melalui Kebersamaan										
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Misi 4 : Memfasilitasi program-program kesejahteraan masyarakat	5. Melaksanakan pendataan masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat	1) Tersedianya data masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	N/A	25	35	45	55	
	6. Memberikan kemudahan dan mengakomodasi masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait	2) Terbarutnya masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait	Persentase PMKS skala Kelurahan yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	N/A	25	35	45	55	
			Persentase PMKS skala Kelurahan yang menerima program pemberdayaan kesejahteraan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain dan perseorangan.	kelompok/ perorangan	4	5	5	5	5	5
Misi 5 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, pembangunan, keagamaan, pelestarian seni budaya, dan kelestarian lingkungan hidup	7. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sosial, kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan hidup	1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sosial, kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan hidup	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	75.00	80.00	82.50	85.00	87.50	
	8. Merencanakan dan menghimpun swadaya masyarakat	2) Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	%	59.35	65.00	70.00	72.50	75.00	
	9. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, perempuan dan kesejahteraan masyarakat	3) Terbarutnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, perempuan dan kesejahteraan masyarakat	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	N/A	10	15	15	20	
Misi 6 : Mewujudkan kemitraan dan kelermbaan umum	10. Melaksanakan kerjasama dengan aparat (Babinsa dan Babinkamtibmas) dalam penyelenggaraan ketentraman dan kelermbaan	1) Terwujudnya sinergi antara Pemerintah Daerah (aparat kelurahan) dengan TNI (Babinsa) dan Polri (Babinkamtibmas) dalam penyelenggaraan ketentraman dan kelermbaan	Posyandu Aktif (Tingkat RW)	%	100	100	100	100	100	
			Cakupan Posyandu Strata Mandiri	%	100	100	100	100	100	
			Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	N/A	65	70	70	75	
	11. Mengoptimalkan peran LINMAS di masyarakat	2) Meningkatnya rasa aman masyarakat	Cakupan peserta KB aktif	%	72.50	75.00	75.00	75.00	75.00	
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat RW	%	0.63	0.75	0.75	0.85	0.90	
			Cakupan patroli siaga kelermbaan umum dan kelermbaan masyarakat	kal/ hari	365	365	365	365	365	
	12. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan ketentraman dan kelermbaan	3) Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara	Tingkat penyelesaian Pelanggaran terkait keamanan, ketentraman, dan kelermbaan umum	%	N/A	100	100	100	100	
			Cakupan Rasio Petugas Linmas (1 orang tiap RT)	%	34.04	35	40	45	50	
			Tingkat partisipasi dalam pemilu	%	69.50	69.50	69.50	69.50	69.50	
		4) Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas	Angka kriminalitas	kasus	N/A	5	5	5	5	

4.3. Strategi dan Kebijakan

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, Renstra SKPD Kelurahan Mintaragen Tahun 2014 – 2019, secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung SKPD Kelurahan Mintaragen dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun rumusan strategi dan kebijakan SKPD Kelurahan Mintaragen dalam kurun lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

VISI : "Terwujudnya Manajemen Pemerintahan yang Efektif dengan Kualitas Pelayanan Prima Berbasis Mutu melalui Kebersamaan"				
MISI - 1 : Menyelenggarakan Manajemen Pemerintahan yang Efektif				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
T1.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan	S1.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Menyelenggarakan kegiatan Musrenbang Tingkat RW dan Tingkat Kelurahan	- Mengeluarkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Rencana Strategis Kelurahan 2019 - Mengeluarkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Rencana Kerja Kelurahan - Menyusun LAKIP	
	S1.1.2 Meningkatkan kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Menetapkan Kinerja Tahunan Kelurahan		
MISI - 2 : Menerapkan sistem standar pelayanan publik berbasis mutu				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
T2.1 Mewujudkan pelayanan publik berbasis mutu dalam rangka tercapainya kepuasan masyarakat dan pelayanan prima melalui perbaikan berkelanjutan (continual improvement) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	S2.1.1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur dan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif	Menyelenggarakan pembinaan internal aparatur kelurahan	Pengajuan Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Menyelenggarakan pengadaan sarana prasarana kantor	
	S2.1.2 Terselenggaranya pelayanan yang sederhana dan mempunyai kepastian waktu	Merancang instrumen pelayanan publik agar dalam pemberian pelayanan bisa lebih cepat dan efisien dan mempersiapkan instrumen penilaian dalam rangka memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2008		
	S2.1.3 Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai	Menyelenggarakan pengadaan sarana prasarana kantor		
MISI - 3 : Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
3.1 Menciptakan sinergi positif pemerintah pada tingkat kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan (RT/ RW, LPMK, PKK, Wartekkel, dan Karang Taruna)	S3.1.1 Terwujudnya sinergi positif pemerintah pada tingkat kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan (RT/ RW, LPMK, PKK, Wartekkel, dan Karang Taruna)	- Mengadakan pertemuan rutin/ berkala antara Kelurahan dengan Lembaga-lembaga kemasyarakatan - Melaksanakan pembinaan bagi Lembaga-lembaga Kelurahan	Mengeluarkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kepengurusan Kelembagaan Kelurahan	
	S3.1.2 Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan (RT/ RW, LPMK, PKK, Wartekkel, dan Karang Taruna)			

MISI - 4 : Memfasilitasi program-program kesejahteraan masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
T4.1 Melaksanakan pendataan masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat	S4.1.1 Tersedianya data masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat	Melaksanakan sinkronisasi hasil pendataan PMKS dan warga tidak mampu yang telah dilakukan oleh berbagai kelembagaan masyarakat/ kader dalam rangka penyusunan data base PMKS dan warga tidak mampu	Menyiapkan data base PMKS dan masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat	
T4.2 Memberikan kemudahan dan mengakomodasi masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait	S4.2.1 Terbantunya masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait	Menyampaikan database masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat ke dinas/ instansi terkait		
MISI - 5 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, pembangunan, keagamaan, pelestarian seni budaya, dan kelestarian lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
T5.1 Melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sosial, kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan hidup	S5.1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sosial, kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur jalan dan drainase kelurahan melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan secara berkala	Mengeluarkan Keputusan Lurah Mintaragen tentang Kelompok Kerja Kegiatan Akselerasi Percepatan Infrastruktur Kelurahan (APIK)	
T5.2 Merencanakan dan menghimpun swadaya masyarakat	S5.2.1 Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatkan dan menggali swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan		
T5.3 Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, perempuan dan kesejahteraan masyarakat	S5.3.1 Terarahnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, perempuan dan kesejahteraan masyarakat	Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, perempuan dan kesejahteraan masyarakat		
MISI - 6 : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
T6.1 Melaksanakan kerjasama dengan aparat (Babinsa dan Babhinkamtibmas) dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	S6.1.1 Terwujudnya sinergi antara Pemerintah Daerah (aparat kelurahan) dengan TNI (Babinsa) dan Polri (Babhinkamtibmas) dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Berperan aktif dalam membangun kerjasama dan saling berkoordinasi antara aparat kelurahan dengan TNI (Babinsa) dan Polri (Babhinkamtibmas)	Mengeluarkan Surat Tugas Jaga bagi Linmas Kelurahan	
T6.2 Mengoptimalkan peran LINMAS di masyarakat	S6.2.1 Meningkatkan rasa aman masyarakat S6.2.2 Meningkatkan kesadaran politik dan bela negara	- Mengaktifkan kegiatan LINMAS Kelurahan - Ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu		
T6.3 Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan ketentraman dan ketertiban	S6.3.1 Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas	Menggalakkan kegiatan Siskamling		

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka SKPD Kelurahan Mintaragen menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program kegiatan di SKPD Kelurahan Mintaragen kurun waktu 2014 – 2019 seperti pada tabel berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja SKPD Kelurahan Mintaragen bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD Kelurahan Mintaragen untuk periode 2014 – 2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tegal. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program dan kegiatan yang telah dirancang.

Indikator kinerja SKPD Kelurahan Mintaragen tersebut dirumuskan berdasarkan analisis terhadap Indikator Kinerja Umum (IKU) yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal dan indikator pelayanan publik lainnya sebagaimana pada Tabel berikut :

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bidang Kesehatan								
Cakupan Posyandu Strata Mandiri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	N/A	N/A	65 %	70 %	70 %	75 %	85 %	85
Bidang Pekerjaan Umum								
Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	75 %	75 %	80 %	82.5 %	85 %	87.5 %	87.5 %	87.5
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	59.35 %	59.35 %	65 %	70 %	72.5 %	75 %	77.5 %	77.5
Perencanaan Pembangunan								
Tersedianya Dokumen Perencanaan sesuai Standar (Renstra SKPD, Renja SKPD, Dokumen Musrenbang)	0 dok	1 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3
Keseluruhan kegiatan APBD dengan kegiatan Renja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
Tersedianya Dokumen LAKIP sesuai standar	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil								
Cakupan Pengantar Pemberbitan Kartu Keluarga (KK)	N/A		250 buah	250 buah	250 buah	250 buah	250 buah	250
Cakupan Pengantar Pemberbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	825 buah		1,250 buah	1,250 buah	1,250 buah	1,250 buah	1,250 buah	1,250
Cakupan Pengantar Pemberbitan Kutipan Akta Kelahiran	235 buah		250 buah	250 buah	250 buah	250 buah	250 buah	250
Cakupan Pengantar Pemberbitan Kutipan Akta Kematian	152 buah		150 buah	150 buah	150 buah	150 buah	150 buah	150
Cakupan Pengantar Pemberbitan Surat Keterangan Pindah/ Datang	601 buah		750 buah	750 buah	750 buah	750 buah	750 buah	750
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
Cakupan peserta KB aktif	72.50 %		72.50 %	72.50 %	72.50 %	72.50 %	72.50 %	72.5
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat RW	0.63 %		0.63 %	0.63 %	0.63 %	0.63 %	0.63 %	0.63
Bidang Sosial								
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	N/A		25 %	35 %	45 %	55 %	60 %	60

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
(2)									
Persentase PMKS skala Kelurahan yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	N/A		25 %	35 %	45 %	55 %	60 %	60	
Jumlah PMKS skala Kelurahan yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain dan bantuan perorangan.	4 klpk / org		5 klpk / org	5 klpk / org	5 klpk / org	5 klpk / org	5 klpk / org	5	
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
Tingkat penyelesaian Pelanggaran terkait keamanan, ketertarikan, dan keterlibatan umum	N/A		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	
Angka kriminalitas	N/A		5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5	
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	365 kali/ hari		365 kali/ hari	365 kali/ hari	365 kali/ hari	365 kali/ hari	365 kali/ hari	365	
Tingkat partisipasi dalam pemilu	69.5 %	69.5 %	69.5 %	69.5 %	69.5 %	69.5 %	80 %	80	
Cakupan Rasio Petugas Linmas (1 orang tiap RT)	34.04 %	34.04 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	55	
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian									
Persentase PNS yang memperoleh penilaian kinerja berkategori "baik" (berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja PNS)	87.5 %		87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5	
Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dengan standar yang baik	25 %		35 %	65 %	75 %	100 %	100 %	100	
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD Kelurahan Mintaragen	N/A		62,51 - 81,25	62,51 - 81,25	62,51 - 81,25	81,26 - 100	81,26 - 100	81,26 - 100	
Zero Komplain (Jumlah Komplain dibagi dengan Jumlah Pelayanan)	0 komplain		0 komplain	0 komplain	0 komplain	0 komplain	0 komplain	0	
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan									
Pembinaan terhadap kelembagaan kelurahan	65 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	
PKK Aktif (Tingkat RW)	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	
Posyandu Aktif	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)	Kondisi Kinerja pada awal periode RP JMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RP JMD	
	Tahun 2013 (3)	Tahun 2014 (4)	Tahun 2015 (5)	Tahun 2016 (6)	Tahun 2017 (7)	Tahun 2018 (8)	Tahun 2019 (9)	(10)	
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	N/A		10 %	15 %	15 %	20 %	20 %	20	

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kelurahan Mintaragen ini merupakan komitmen Organisasi dan merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur SKPD Kelurahan Mintaragen dalam kurun waktu 5 tahun (2014 – 2019). Oleh karena itu, untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya kesungguhan dan partisipasi serta koordinasi yang sebaik-baiknya dari semua pihak dan terutama jajaran aparatur SKPD Kelurahan Mintaragen.

Perumusan dan penyusunan Perencanaan Strategis SKPD Kelurahan Mintaragen tahun 2014 – 2019 ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada propenas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal. Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta kompleksitas permasalahan di kelurahan, maka Rencana Strategis SKPD Kelurahan Mintaragen ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan pemerintahan di Kelurahan Mintaragen.

Renstra SKPD Kelurahan Mintaragen tahun 2014 – 2019 ini tetap berlaku dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Tegal tahun 2005 – 2025. Demikian Perencanaan Strategis Pembangunan SKPD Kelurahan Mintaragen tahun 2014 – 2019 disusun, dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.